



Ketepatan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Teguh Erawati¹, Hildegardis Olci Herawati²

^{1,2}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

E-mail: eradimensiarch@gmail.com^{1*)}
herawatiocin@gmail.com²⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 29 Desember
2022
Received in Revised 14
Juli 2025
Accepted 30 November
2025

Keyword's :
Accountability,
Performance-Based
Budgeting, Budget
Targets

ABSTRACT

This study aims to prove the effect of the dimensions of accountability, accuracy of budget targets and implementation of performance-based budgeting on performance accountability of government agencies. The sampling technique uses the pemprov sampling method. The population in this study were all employees in the Yogyakarta City Procurement Service Section (BLP). The data used were 60 respondents. Data collection was carried out using a questionnaire via Google Form, before testing the hypothesis with multiple regression analysis, testing the quality of the data and testing the classical assumptions were carried out first. The results of this study indicate that the accuracy of budget targets has a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh dimensi akuntabilitas, ketepatan sasaran anggaran dan implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode pemprov sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta. Data yang digunakan sebanyak 60 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner melalui google form, sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisa regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas data dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuisisi : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +62889-8756-9843; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: eradimensiarch@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Jurnal Akuisisi. **2477-2984**.

<http://dx.doi.org/10.24217><http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena semakin banyaknya instansi pemerintah kelihatan tidak peduli terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan yang diajukan masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan public yang lebih baik. Setiap instansi pemerintahan atau pihak yang diberi mandat dan amanah harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dengan kata lain, laporan pertanggungjawaban tersebut bukan sekadar laporan kepatuhan dan kewajaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi termasuk juga kinerja dari pelaksanaan suatu manajemen strategis yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini instansi pemerintah harus dapat melaporkan keberhasilan yang telah dicapai dan berani mengungkapkan kegagalan yang terjadi berkaitan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi (Putra et al., 2016)

Ikatan Akuntan Indonesia (2002:4) Kinerja dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan oleh (Pangumbaleng & Pinatik, 2014) menyatakan bahwa, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Dapat disimpulkan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi.

Fenomena yang terjadi pada kinerja instansi pemerintah adalah fenomena yang terjadi adalah hasil evaluasi kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk : Menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan/sasaran, menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran, dan menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran.

Ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada

sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah memiliki kejelasan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada instansi pemerintah. Ketepatan sasaran anggaran pada pemerintah daerah akan memberikan implikasi terhadap kinerja aparatur daerah yang lebih baik, maka hasil akhir dari kinerja sendiri merupakan hasil akhir (output) organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi (Paramitha & ., 2016). Ketepatan sasaran anggaran merupakan keadaan tepat, keakuratan, ketelitian, dan kejelian dengan objek yang didasarkan sesuatu yang menjadi tujuan rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode tertentu (KBBI, 2008:1445, KBBI, 2008:678 (Sadeli & Pendahuluan, 2018).

Pembeda penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah peneliti ini menambahkan beberapa variabel independen yaitu implementasi anggaran berbasis kinerja. (Paramitha & ., 2016) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh ketepatan sasaran anggaran, sistem pengendalian manajerial sektor publik dan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja, jurnal referensi dalam survei saat ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kajian Teori

Stewardship Theory

Stewardship Theory berangkat dari perpektif pemikiran akuntansi manajemen yang banyak didasari teori-teori psikologi dan sosiologi. Penelitian yang dilakukan Anto (2010) menjelaskan bahwa *Stewardship Theory* difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal (principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama. Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis.

Teori Institusional

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Telah banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan teori institusional dalam penelitiannya Dacin et al.(2002 dalam (Pratama et al., 2018) menyatakan bahwa teori institusional adalah penjelasan populer dan kuat mengenai tindakan individu dan organisasi. Teori institusional memberi pandangan bahwa tekanan eksternal yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi seperti politik, norma-norma, praktik-praktik institusional dalam bentuk

tekanan fungsional dan sosial, akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi.

Implementasi ABK pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang mengintegrasikan informasi kinerja ke dalam proses penganggaran tahunan atau pada pengalokasian sumber daya organisasi. Informasi kinerja itu sendiri dapat dimaknai sebagai informasi terkait hasil-hasil yang dicapai dari suatu kegiatan dan juga termasuk informasi atas biaya-biaya yang dikorbankan untuk mencapai hasil-hasil tersebut.

Peneliti ini menjadikan teori institusional sebagai dasar hipotesis ketiga, Untuk melihat konsep dasar sebuah organisasi, telah banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan teori institusional dalam penelitiannya (Paramitha & ., 2016) menyatakan bahwa teori institusional adalah penjelasan populer dan kuat mengenai tindakan individu dan organisasi. Teori institusional memberi pandangan bahwa tekanan eksternal yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi seperti politik, norma-norma, praktik-praktik institusional dalam bentuk tekanan fungsional dan sosial, akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Paramitha & ., 2016) yang menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan efektif, perlu adanya instrumen evaluasi kerja pada penyerapan anggaran yang termuat dalam aturan Normatif yang diberlakukan. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Ketepatan sasaran anggaran dalam suatu pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Adanya kejelasan sasaran anggaran secara spesifik akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi sehingga mendorong pegawai untuk melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *stewardship theory*. *Stewardship* berdasar kepada aspek manusia yaitu tingkah laku perilaku (*behavior*), model (*model of man*), dan psikologis seperti motivasi dan kekuasaan pada organisasi yang menganggap kepemimpinan sebagai hal krusial dalam pencapaian tujuannya. *Stewardship* menjelaskan bahwa manajemen tidak mempunyai tujuan-tujuan individual namun lebih mengarah pada sasaran terkait kepentingan organisasi (Sadeli & Pendahuluan, 2018)

Anggaran adalah sebuah pernyataan perkiraan kinerja yang ingin ditargetkan dalam satu periode tertentu dalam ukuran keuangan, sedangkan penganggaran merupakan proses persiapan penyediaan anggaran. Adanya kejelasan dan ketepatan dalam anggaran tentunya dapat memudahkan dalam mempertanggungjawabkan berhasil atau gagalnya tugas suatu organisasi sehingga memotivasi pekerja untuk mencapai tujuan organisasi (Perusahaan & Perusahaan, 2018). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Paramitha & ., 2016) menyatakan bahwa adanya kejelasan dan ketepatan dalam anggaran tentunya dapat memudahkan dalam mempertanggung jawabkan berhasil atau gagalnya tuugas suatu organisasi. (Erawati & Tamansiswa, 2022). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂: Ketepatan Sasaran Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Yogyakarta. Ada-pun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *pur-positive sampling*. Data yang diperoleh melalui metode ini merupakan data primer. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner yang langsung diberikan kepada para responden untuk dapat diisi sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Analisa data merupakan cara yang bisa menyelesaikan permasalahan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis regresi linear berganda serta bantuan dari aplikasi SPSS 26.0 for windows untuk membantu perhitungan dalam penelitian tersebut. Uji hipotesis perlu dilakukan tetapi sebelum itu terdapat beberapa uji asumsi klasik yang harus dilakukan sebelumnya diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Setelah itu dilakukan uji hipotesis yaitu uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	60	10,00	32,00	26,3500	5,11503
Ketepatan Sasaran Anggaran	60	17,00	44,00	37,4000	6,45768
Kinerja Instansi Pemerintah	60	25,00	50,00	40,8500	5,72187
Valid N (Listwise)	60				

Sumber : data primer, diolah spss22

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa :

- Dari Tabel.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai minimum untuk variabel implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 10, nilai maksimum 32 dengan rata-rata 26,3500 dan standar deviasi 5,11503.
- Variabel ketepatan sasaran anggaran nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 44 dengan rata-rata 37,4000 dan standar deviasi 6,45768.
- Variabel kinerja instansi pemerintah nilai minimum sebesar 25, maksimum 50 dengan rata-rata 40,8500 dan standar deviasi 5,72187.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Pearson Correlation	r-tabel	sig	Hasil
1.	Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja				
	X3P1	0,825	0,254	0,000	Valid
	X3P2	0,780	0,254	0,000	Valid
	X3P3	0,770	0,254	0,000	Valid
	X3P4	0,852	0,254	0,000	Valid
	X3P5	0,909	0,254	0,000	Valid
	X3P6	0,811	0,254	0,000	Valid
	X3P7	0,864	0,254	0,000	Valid
2	Ketepatan Sasaran Anggaran				
	X2P1	0,867	0,254	0,000	Valid
	X2P2	0,830	0,254	0,000	Valid
	X2P3	0,849	0,254	0,000	Valid
	X2P4	0,764	0,254	0,000	Valid
	X2P5	0,852	0,254	0,000	Valid
	X2P6	0,611	0,254	0,000	Valid
	X2P7	0,750	0,254	0,000	Valid
	X2P8	0,857	0,254	0,000	Valid
	X2P9	0,757	0,254	0,000	Valid
	X2P10	0,855	0,254	0,000	Valid
3	Kinerja Instansi Pemerintah				
	YP1	0,841	0,254	0,000	Valid

No	Variabel	Pearson Correlation	r-tabel	sig	Hasil
	YP2	0,873	0,254	0,000	Valid
	YP3	0,840	0,254	0,000	Valid
	YP4	0,807	0,254	0,000	Valid
	YP5	0,827	0,254	0,000	Valid
	YP6	0,733	0,254	0,000	Valid
	YP7	0,856	0,254	0,000	Valid
	YP8	0,754	0,254	0,000	Valid
	YP9	0,529	0,254	0,000	Valid
	YP10	0,638	0,254	0,000	Valid
	YP11	0,870	0,254	0,000	Valid

Sumber: Primer diolah, spss 22

Berdasarkan hasil tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini dibuktikan dengan nilai Pearson Correlation >r-tabel yaitu nilai pearson dari seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,254 dan nilai signifikan <0,05.

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas dilakukan menggunakan program SPSS Versi 22. Berdasarkan Output SPSS, hasil uji reabilitas tersaji pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach,s Alpha	Keterangan
1	Implementasi anggaran berbasis kinerja	0,924	Realiablel
2	Ketepatan sasaran anggaran	0,935	Realiablel
3	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0,933	Realiablel

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal	Mean	0E-7
Parameter	Std. Deviation	1,96334970
^{a,b}		
Most	Absolute	,084
Extreme	Positive	,084
Difference	Negative	-,083
s		
Kolmogorov-Smirnov Z		,653
Asymp. Sig. (2-tailed)		,787

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder, olah data SPSS 22

Berdasarkan hasil dari uji *kolmogrov smirnov* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,787. Ini membuktikan bahwa nilai signifikan > 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas atau residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	,208	9,243
	Ketepatan Sasaran Anggaran	,202	9,786

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolinearitas pada variabel Dimensi Akuntabilitas, Ketepatan Sasaran Anggaran dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hal tersebut menunjukkan telah memenuhi kriteria, sehingga dapat dikatakan penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	0,559
Ketepatan Sasaran Anggaran	0,748

Sumber : Data Sekunder, olah data SPSS 22

Berdasarkan dari hasil uji Glejser yang terjadi pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,365	1,685		6,150	,000
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	,332	,156	,301	2,128	,038
Ketepatan Sasaran Anggaran	,511	,127	,586	4,022	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Data Sekunder, olah data SPSS 22

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi model regresi linear berganda antara implementasi anggaran berbasis kinerja dan ketepatan sasaran anggaran secara simultan terhadap kinerja perusahaan, maka diperoleh persamaan :

$$Y = 10,365 + 0,511M1 + 0,332PB1 + e \dots\dots\dots(1)$$

Model persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Koefisien nilai untuk konstanta sebesar 10,365 menjelaskan bahwa baik buruknya dimensi akuntabilitas, ketepatan sasaran anggaran dan implementasi anggaran berbasis kinerja yang diterapkan dalam kinerja instansi pemerintah memiliki nilai konstan sebesar 10,365.
2. Pada model regresi linier berganda, nilai koefisien dari variabel implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,332 yang menunjukkan bahwa variabel implementasi anggaran berbasis kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Ini berarti apabila setiap kenaikan 1 satuan variabel implementasi anggaran berbasis kinerja dan yang lain konstan maka akan mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi berkarir dibidang perpajakan sebesar 0,332.
3. Pada model regresi linier berganda, nilai koefisien dari variabel ketepatan sasaran anggaran sebesar 0,511 yang menunjukkan bahwa variabel ketepatan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Ini berarti apabila setiap kenaikan 1 satuan variabel ketepatan sasaran anggaran dan yang lain konstan maka akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah sebesar 0,511.

Uji secara Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji T

Variabel	T	Sig
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	2,128	0,038
Ketepatan Sasaran Anggaran	4,022	0,000

Sumber : Data Sekunder, olah data SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9 menunjukkan nilai t-hitung > r-tabel dan signifikansi < 0,05. Nilai t-hitung pada variabel Implmentasi Anggaran Berbasis Kinerja sebesar 2,128 > ,2,00324 dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,038 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa Variabel Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- b. Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 9 nenunjukkan Nilai t hitung > r tabel dan signifikan < 0,05. Nilai t-hitung pada variabel Ketepatan Sasaran Anggaran sebesar 4,022 > 2,00324 dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini

membuktikan bahwa Variabel Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga hipotesis diterima.

Uji secara Simultan (Uji F)

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1646,754	3	548,918	135,160	,000 ^b
Residual	227,430	56	4,061		
Total	1874,183	59			

Dependent Variable: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber : Data Sekunder, olah data SPSS 22

Pada hasil perhitungan uji F dari tabel 9 diatas, variabel dimensi akuntabilitas, ketepatan sasaran anggaran dan implementasi anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,937 ^a	,879	,872	2,01525

Predictors: (Constant), Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Ketepatan Sasaran Anggaran

Sumber : Data Sekunder, olah data SPSS 22

Pada tabel diatas , diketahui nilai koefisien R square sebesar 0,872 atau 87,2 %. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu, ketepatan sasaran anggran dan implementasi anggaran berbasis kinerja secara simultan memberikan pengaruh kepada kinerja instansi pemerintah sebesar 87,2% dan sisanya sebesar 10,2 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil uji regresi hipotesis I yang terlihat pada tabel 9 diperoleh nilai t-hitung 2,128 dan signifikansi sebesar 0,038. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai t-hitung (2,128) > t-tabel (2,0034) dan nilai signifikan 0,038 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H1) terdukung yang berarti pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap kinerja Instansi Pemerintah.

Terdukungnya Hipotesis I ,memberikan makna bahwa dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja menjadi suatu cara dalam mewujudkan pencapaian kinerja dimana dalam sistem penganggaran sangat memperhitungkan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhitungkan efisiensi dalam mencapai kinerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori stewardship bahwa mekanisme penanggungjawaban dari organisasi yaitu dengan bekerja sesuai tugas dan tanggungjawabnya sebaik mungkin, secara tepat dan efisien untuk kepentingan publik dan instansi (Febrianti & Indrawati Yuhertiana, 2021). Apabila menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan lebih maksimal, maka penyaluran anggaran bisa terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, serta menghadirkan pelaporan yang akuntabel, jelas dan lebih mengutamakan kepada tujuan dengan strategi yang terukur dalam menggunakan anggaran. Penelitian ini mendukung hasil temuan (Febrianti & Indrawati Yuhertiana, 2021) menyatakan bahwa apabila menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan lebih maksimal, maka penyaluran anggaran bisa terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, serta menghadirkan pelaporan yang akuntabel, jelas dan lebih mengutamakan kepada tujuan dengan strategi yang terukur dalam menggunakan anggaran. Implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil uji regresi hipotesis II yang terlihat pada tabel 4.9 diperoleh nilai t-hitung 4,022 dan signifikansi sebesar 0,000. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan nilai t-hitung (4,022) > t-tabel (2,0034) dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Hipotesis (H II) terdukung yang berarti pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketepatan sasaran anggaran dalam sistem pemerintahan daerah merupakan hal yang sangat diperlukan untuk mengetahui kinerja yang terjadi di lapangan apakah tepat pada sasaran pembangunan dan perkembangan masyarakat. Aparatur pemerintah daerah memiliki kejelasan untuk mengelola keuangan dengan tepat sehingga penyusunan anggaran pada periode selanjutnya dapat tercapai dengan baik pada instansi (Paramitha & ., 2016) Penelitian ini mendukung hasil temuan (Febrianti & Indrawati Yuhertiana, 2021) memberikan makna bahwa dengan adanya ketepatan sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan mempermudah tanggungjawab pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut sesuai dengan goal setting theory yakni menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang

dihasilkan. Ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, yang berarti perbaikan implementasi penganggaran berbasis kinerja akan meningkatkan kinerja instansi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan kegiatannya masih terdapat kendala, seperti anggaran yang telah direncanakan belum dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga berpengaruh pada penilaian kinerja, kualitas sumber daya manusia masih belum optimal meskipun sudah terwakili dan masih rendahnya tanggung jawab aparatur dinas untuk menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Hasil penelitian ini seiring dengan penelitian yang dijalankan oleh (Syamsul, 2018) yang menyatakan bahwa implementasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Ketepatan Sasaran Anggaran berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti bahwa dengan adanya sasaran anggaran yang tepat maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya Kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode pengisian kuesioner, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode lain dalam pengumpulan data seperti dengan metode wawancara. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat yaitu dengan menambah variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah seperti kesulitan tujuan anggaran, komitmen organisasi, partisipasi penyusunan anggaran dan sebagainya. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode pengumpulan data ini melalui google form dalam menyebarkan kuesioner memiliki kelemahan yaitu prosesnya sangat lama karena peneliti tidak memantau secara langsung dalam pengisian kuesioner sehingga responden cenderung kurang serius dalam mengisi kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Erawati, T., & Tamansiswa, U. S. (2022). *Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Investment Opportunity Set (Ios)*. 5(2).

- Febrianti, T., & Indrawati Yuhertiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Pangumbalerang, A., & Pinatik, S. (2014). Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. *Jurnal EMBA*, 2(2), 800–808.
- Paramitha, I., & . G. (2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(3), 2457–2479.
- Perusahaan, L., & Perusahaan, N. (2018). *Erina Sudaryati 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Indonesia*. 828–839.
- Pratama, N. D., Abdurahim, A., & Sofyani, H. (2018). Determinan Efektivitas Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i1.23>
- Putra, B., Hasan, A., & Yasni, H. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Desentralisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Skpd Bengkalis). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1123–1136.
- Sadeli, Y. A., & Pendahuluan, I. (2018). *Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan*. 3(2), 169–183.
- Syamsul, E. M. M. P. (2018). Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Studi pada Instansi Pemerintah Daerah). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 1–19. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i2.933>